

INDIKATOR TENAGA KERJA 2016

PROVINSI LAMPUNG 2016



Agustus 2016

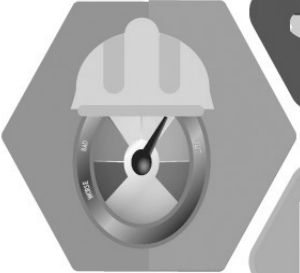


BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG

INDIKATOR TENAGA KERJA 2016

PROVINSI LAMPUNG 2016

15⁺



Agustus 2016

INDIKATOR TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG AGUSTUS 2016

ISSN : 2085 - 8981

No. Publikasi : 18520.1704

Katalog BPS : 2302003.18

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xx + 94 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Penyunting : Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dicetak oleh : CV Mega Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tim penyusun
INDIKATOR TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG
AGUSTUS 2016

Pengarah :

Yeane Irmaningrum S

Penanggung Jawab Umum :

Mas'ud Rifai

Penanggung Jawab Teknis :

Budi Setiawan

Editor :

Radika Trianda

K. Nurika Damayanti

Penulis dan Pengolah Data :

M.E. Ivan Sihaloho

Desliyani Tri Wandita

Design dan Layout :

M.E. Ivan Sihaloho

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode Februari 2011-Februari 2014 dilaksanakan secara triwulanan, dan sejak Februari 2015 dilaksanakan secara semesteran. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara teratur dan berkesinambungan. Sakernas Februari menghasilkan angka estimasi sampai dengan tingkat provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota, kecuali pada Agustus 2016 hanya bisa menyajikan hingga tingkat provinsi.

Publikasi ini menyajikan *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Agustus 2016, Februari 2016, dan Agustus 2016. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), dengan harapan bisa dijadikan sebagai acuan mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO, baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Bandar Lampung, Juni 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung



Yeane Irmaningrum S, MA

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	j
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)	v]]
DAFTAR ISI]I
DAFTAR TABEL	I]
DAFTAR GRAFIK	x]]]
DAFTAR LAMPIRAN.....	xj
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xv]]
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan.	1
1.2. Sakernas dan KILM	3
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan .	6
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	10
BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA..	13
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	13
KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk.....	16
KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	20
KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	23
KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	24
KILM 6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	29
KILM 7. Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Informal	32
BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN	37
KILM 8. Pengangguran	37
KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda	38
KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	44
KILM 12. Setengah Penganggur	50
KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan	55

BAB 4 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF.....	59
KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf.....	59
PENJELASAN TEKNIS	63
LAMPIRAN	85

<https://lampung.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2015-2016	20
Tabel 2.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015-2016.....	23
Tabel 3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2015- 2016	38
Tabel 4.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Provinsi Lampung, 2015-2016	43
Tabel 5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015-2016	46
Tabel 6.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016	48
Tabel 7.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur , 2015-2016	51
Tabel 8.	Indikator Setengah Penganggur, 2015-2016	52
Tabel 9.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016	55
Tabel 10.	Indikator Ketidakaktifan (Persen), 2015-2016	56
Tabel 11.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2016-2016	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2015-2016.....	13
Grafik 2.	TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2015-2016	14
Grafik 3.	TPAK Menurut Kelompok Umur (Persen), 2015- 2016.....	15
Grafik 4.	<i>Employment to Population Ratio</i> , 2015-2016	16
Grafik 5.	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016.	17
Grafik 6.	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur, 2015-2016	18
Grafik 7.	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur, Februari 2016 dan Agustus 2016.....	19
Grafik 8.	Persentase Pekerja Rentan, 2015-2016	21
Grafik 9.	Persentase Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2016	22
Grafik 10.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2015-2016	25
Grafik 11.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2015-2016	26
Grafik 12.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2015-2016	27
Grafik 13.	<i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (Persen), 2015-2016	28
Grafik 14.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2015-Agustus 2016	29
Grafik 15.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2016.....	30

Grafik 16.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2016.	31
Grafik 17.	Persentase Penduduk Bekerja Formal dan/Informal, 2015-2016	33
Grafik 18.	Persentase Penduduk Bekerja Formal/ Informal dan Jenis Kelamin , 2015- 2016	34
Grafik 19.	Persentase Penduduk Bekerja Formal/ Informal dan Daerah Tempat Tinggal , 2015- 2016	35
Grafik 20.	TPT Penduduk Umur Muda (Persen), 2015-2016..	39
Grafik 21.	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2015-2016	40
Grafik 22.	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2015-2016	41
Grafik 23.	Share Penganggur Umur Muda (persen), 2015-2016	44
Grafik 24.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016. ..	45
Grafik 25.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016.	54
Grafik 26.	Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015-2016.....	57
Grafik 27.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kelompok Umur, Februari 2016 dan Agustus 2016	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur, 2015-2016.....	87
Lampiran 2.	Penduduk Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2015 – 2016.....	88
Lampiran 3.	Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2015-2016.....	89
Lampiran 4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2015-2016.....	90
Lampiran 5.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal dan Jumlah Jam Kerja, 2015-2016.....	91
Lampiran 6.	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2015-2016.....	92
Lampiran 7.	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2015-2016.....	93
Lampiran 8.	Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal/Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan jenis Pekerjaan Utama.....	94

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 mencapai 5.921,2 ribu orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 36,9 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 (263,5 ribu orang) dan naik sebanyak 79,2 ribu orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2015 (5.842 ribu orang).

Naiknya jumlah angkatan kerja juga berpengaruh pada menurunnya persentase TPAK dari 68,63 persen pada Februari 2016 menjadi 69,61 persen pada Agustus 2016, jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015, mengalami peningkatan persentase TPAK dari 65,6 persen meningkat menjadi sebesar 69,61 persen pada keadaan Agustus 2016.

Secara Provinsi Lampung angka EPR pada Agustus 2016 adalah sebesar 66,39. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 66 orang yang bekerja pada Agustus 2016. EPR ini mengalami kenaikan jika dibandingkan keadaan Februari 2016 sebesar 0,88 persen poin dan mengalami peningkatan pada Agustus 2015 sebesar 4,16 persen poin.

Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2016 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Agustus 2015 dan Februari 2016), persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar (39,17 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai) (26,78persen), dan urutan

tiga yaitu status penduduk dengan status pekerja bebas (10,90 persen)

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Provinsi Lampung pada Agustus 2016 masih mempunyai pola yang sama dengan Februari 2016 dan Agustus 2015 yaitu didominasi oleh sektor pertanian dengan persentase penduduk bekerja pada sektor pertanian sebesar 48,28 persen. Selanjutnya adalah sektor jasa-jasa sebesar 37,13 persen, dan sektor manufaktur sebesar 14,59 persen.

Pada Agustus 2016, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 25,38 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat 25 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan terhadap Februari 2016 sebesar 1,95 persen poin dan penurunan cukup besar terhadap Agustus 2015 sebesar 4,39 persen poin.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar 65,54 persen penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 34,46 persen dan mengalami peningkatan 4,15 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2016 penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar (61,39 persen) dan mengalami peningkatan sebesar 5,86 persen poin terhadap hasil Sakernas Agustus 2015 (59,68 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar 65,54 persen penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 34,46 persen jika dibandingkan dengan Februari 2016 penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar (61,39 persen) mengalami peningkatan

sebesar 4,15 persen terhadap hasil Sakernas Agustus 2016. Dan mengalami peningkatan sebesar 5,86 persen poin dibandingkan kondisi Agustus 2015 (59,68 persen).

TPT berdasarkan Sakernas Agustus 2016 mencapai 4,62 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di provinsi Lampung, terdapat rata-rata sebanyak 4,62 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa TPT di Provinsi Lampung mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 sebesar 0,06 poin dari 4,54 persen menjadi 4,62 persen, namun bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 mengalami penurunan 0,52 poin dari 5,14 persen menjadi 4,62.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 20,68 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 21 orang yang menganggur. Angka tersebut bila dibandingkan dengan Februari 2016 dan Agustus 2015 masing-masing mengalami kenaikan 3,56 dan 7,17 persen poin.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 6,56 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah tamat sekolah dasar dengan TPT sebesar 1,46 persen.

Jumlah setengah penganggur di Provinsi Lampung berdasarkan Sakernas Agustus 2016, mencapai 282.390 orang, yang terdiri dari 82.270 orang berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 200.120 orang adalah laki-laki. Jika dilihat menurut klasifikasi daerah tempat tinggal, pada Agustus 2016,

jumlah setengah penganggur di perkotaan mencapai 81.922 orang, sementara di perdesaan sebanyak 200.468 orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, tingkat ketidakaktifan di Provinsi Lampung mencapai 30,39 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 31 orang. Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2016 turun jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 sebesar 0,98 persen poin dan turun Agustus 2015 sebesar 4,01 persen poin.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, secara provinsi Lampung tidak terdapat perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas Februari 2016. Angkatan kerja pada Agustus 2016 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang tamat sekolah menengah yaitu sebesar 47,03 persen. Sementara itu, angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah dasar sebesar 28,10 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 7,96 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 16,91 persen.

BAB 1

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Provinsi Lampung. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Lampung. BPS Provinsi Lampung pada tahun 2016 ini, pertama kalinya untuk penyusunan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja 2016, yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KIL Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat

menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat Provinsi Lampung.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak

dilaksanakan. Pada tahun 2016 ini, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak tahun 2015, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel Sakernas pada Agustus 2015 sekitar 200.000 rumah tangga, sedangkan pada Agustus 2016 sekitar 50.000 rumah tangga.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.2. Sakernas dan KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisis data

ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error-nya*.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan Agustus 2016 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2016, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011 hingga saat ini, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/serhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awal dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan,

Untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisis informasi pasar

tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga dapat menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4),

jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan *Millenium* (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

3) Memantau Kesetaraan Gender di Pasar Tenaga Kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji Tenaga Kerja di Era Globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antar daerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya dapat menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi. Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang dapat memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya melalui

pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga dapat menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang

lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

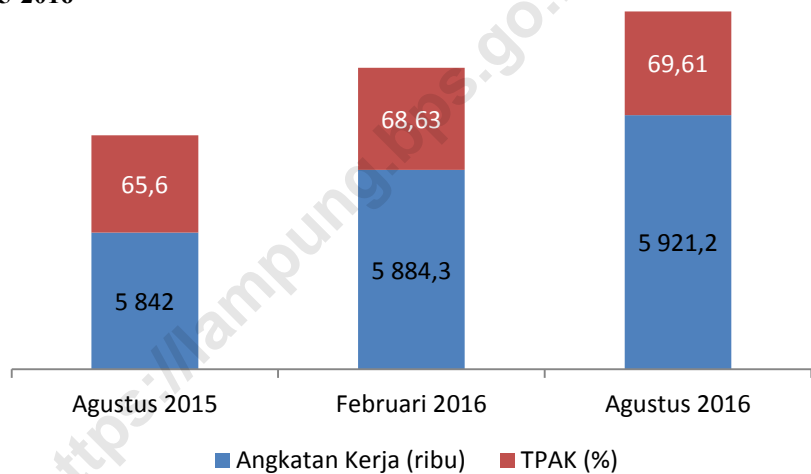
BAB 2

PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

“Jumlah angkatan kerja dan TPAK menurun”

Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2015-2016

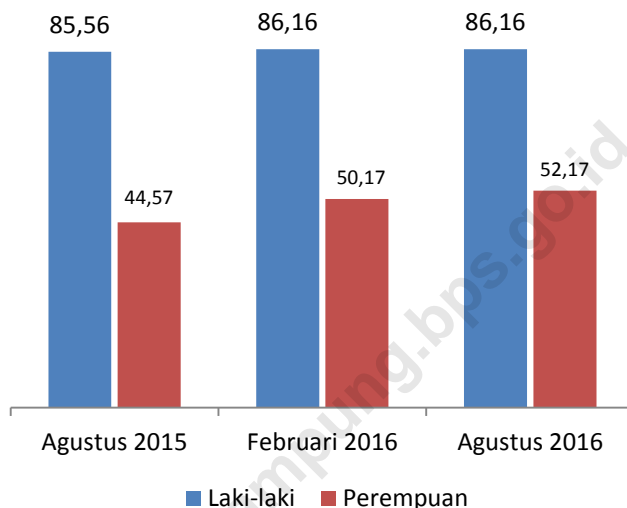


Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 mencapai 5.921,2 ribu orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 79,2 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun 2015 (5.842 ribu orang) dan naik sebanyak 36,9 ribu orang jika dibandingkan keadaan Februari 2016 (263,5 ribu orang). Kenaikan jumlah angkatan kerja juga berpengaruh pada kenaikan persentase TPAK dari 65,60 persen pada Agustus 2015 menjadi 69,61 persen pada Agustus 2016, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 mengalami peningkatan

persentase TPAK dari 68,63 persen meningkat menjadi sebesar 69,61 persen pada keadaan Agustus 2016.

“TPAK laki-laki masih lebih tinggi dari TPAK perempuan”

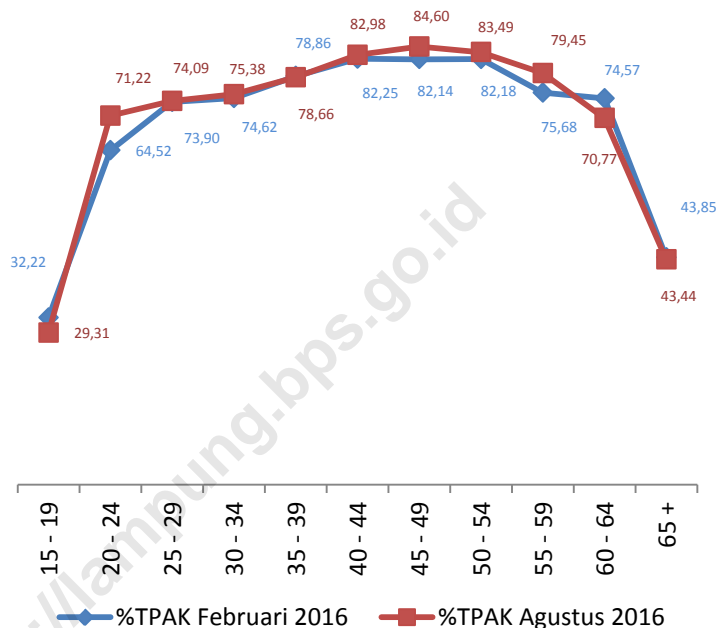
Grafik 2. TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2015-2016



Di Provinsi Lampung, biasanya TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut juga terlihat pada keadaan Agustus 2016, dimana TPAK laki-laki mencapai 85,56 persen sementara pada perempuan hanya 52,17 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 86 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, terdapat sekitar 52 orang yang termasuk angkatan kerja.

“TPAK Agustus 2016 hampir selalu lebih rendah dari Februari 2016 dan lebih tinggi dari Agustus 2015 pada tiap kelompok umur”

Grafik 3. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016



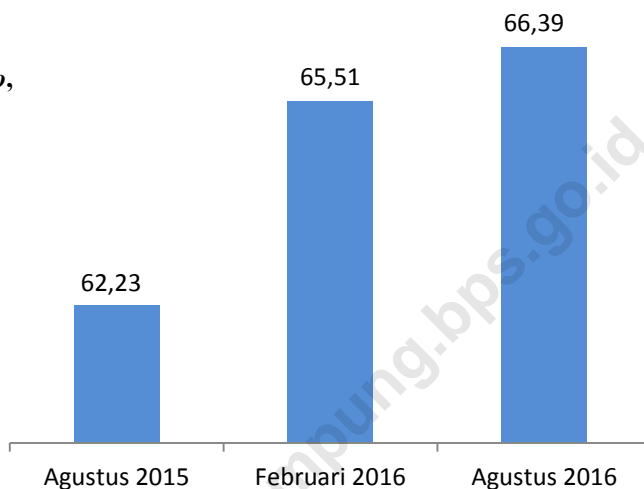
Secara total TPAK Agustus 2016 lebih tinggi dari pada TPAK Agustus 2015 dan lebih tinggi dari TPAK Februari 2016, hal yang sama juga terjadi pada hampir semua kelompok umur, kecuali pada kelompok umur 15-19, 35-39, 60-64 dan 65+. TPAK terbesar terdapat pada kelompok umur 45 – 49 tahun.

KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk

“Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk pada Agustus 2016 adalah sebesar 66,39”

Grafik 4.

*Employment to
Population Ratio,
2015 -2016*



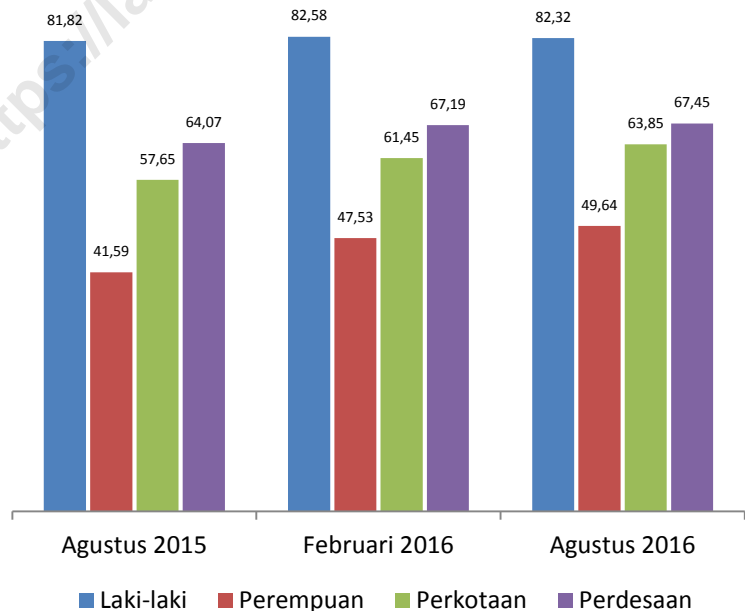
Salah satu indikator penting dalam pasar kerja adalah EPR, secara provinsi angka EPR pada Agustus 2016 adalah sebesar 66,39. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 66 orang yang bekerja pada Agustus 2016. EPR ini mengalami kenaikan jika dibandingkan keadaan Februari 2016 sebesar 0,88 poin dan mengalami peningkatan daripada Agustus 2015 sebesar 4,16 poin.

“EPR laki-laki lebih tinggi dari EPR perempuan dan EPR di pedesaan lebih tinggi dari EPR di perkotaan”

Pada periode Agustus 2015, Februari 2016 maupun Agustus 2016, dilihat berdasarkan jenis kelamin EPR laki-laki lebih

tinggi sekitar 1,6 kali dibandingkan EPR perempuan. Sebagai contoh pada Agustus 2016, EPR laki-laki pada periode ini adalah sebesar 82,32 sedangkan EPR perempuan hanya sebesar 49,64. Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2016 EPR daerah perkotaan (63,85) lebih rendah dibanding EPR daerah perdesaan (67,45). Begitu pula untuk periode Februari 2016 dan Agustus 2015, dimana wilayah perkotaan EPR-nya lebih rendah dibanding wilayah perdesaan. EPR daerah perkotaan periode Agustus 2015-Februari 2016 mengalami peningkatan yaitu 3,8 poin dan Februari 2016-Agustus 2016 mengalami peningkatan pula yaitu 2,4 poin sedangkan untuk wilayah perdesaan periode Agustus 2015-Februari 2016 mengalami peningkatan yaitu 3,12 poin dan Februari 2016-Agustus 2016 mengalami kenaikan lagi yaitu 0,26 poin.

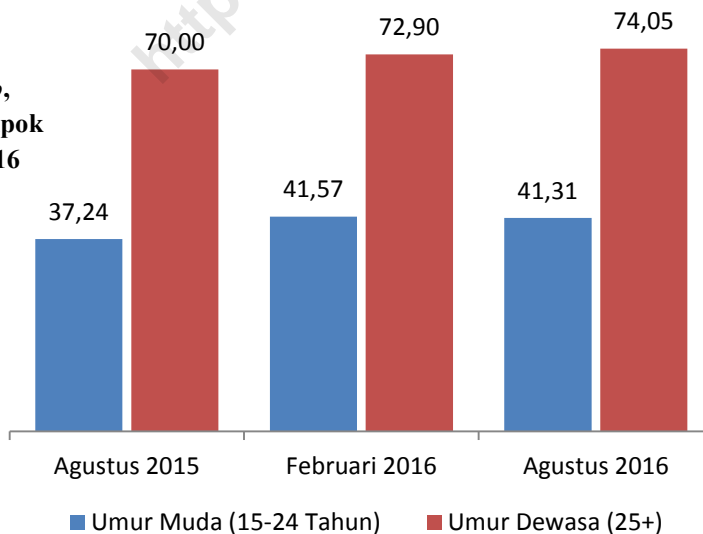
Grafik 5.
Employment to Population Ratio, Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015 - 2016



“EPR kelompok umur muda lebih rendah dari EPR kelompok umur dewasa”

Grafik 6, memperlihatkan bahwa EPR penduduk kelompok umur muda selalu lebih rendah dari penduduk kelompok umur dewasa baik pada Agustus 2015, Februari 2016, maupun Agustus 2016. EPR penduduk kelompok umur muda lebih rendah sekitar 36 persen penduduk kelompok umur dewasa. EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15-24 tahun), pada periode Agustus 2015-Februari 2016 meningkat sebesar 4,33 poin dari 37,24 menjadi 41,57, namun periode Februari 2016–Agustus 2016 mengalami penurunan sebesar 0,26 poin dari 41,57 menjadi 41,31. Sedangkan EPR untuk penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun ke atas), pada periode Agustus 2015-Februari 2016 meningkat sebesar 2,90 poin dari 70,00 menjadi 72,90 dan pada periode Februari 2016–Agustus 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar 1,15 poin dari 72,90 menjadi 74,05.

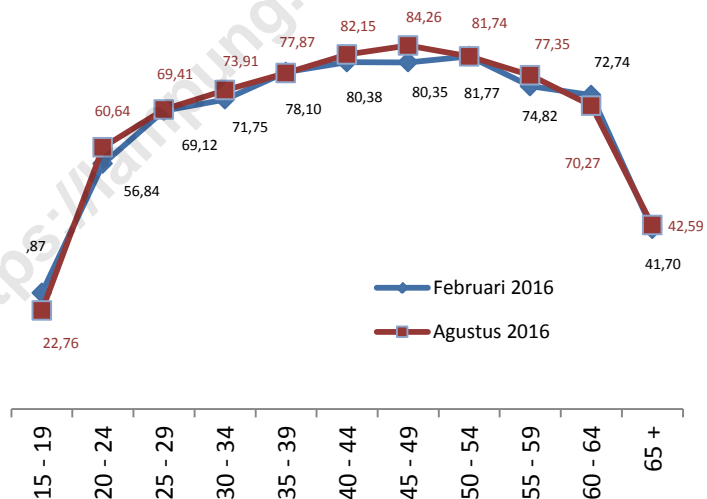
Grafik 6.
Employment to Population Ratio, Menurut Kelompok Umur, 2015 -2016



“EPR tertinggi pada kelompok umur 45-49 tahun”

Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada grafik 7 mirip dengan pola TPAK pada grafik. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari grafik 7 terlihat bahwa puncak EPR untuk keadaan Agustus 2016 ini berada pada kelompok umur 45-49 tahun dengan EPR 84,26. Grafik EPR periode Februari 2016 dan Agustus 2016 terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur, dengan nilai EPR Agustus 2016 lebih tinggi pada hampir semua kelompok umur, kecuali kelompok umur 15-19 tahun dan 60-64 tahun.

Grafik 7.
Employment to Population Ratio, Menurut Kelompok Umur, Februari 2016 dan Agustus 2016



KILM 3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

“Mayoritas pekerja di Provinsi Lampung berstatus berusaha”

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013-2016

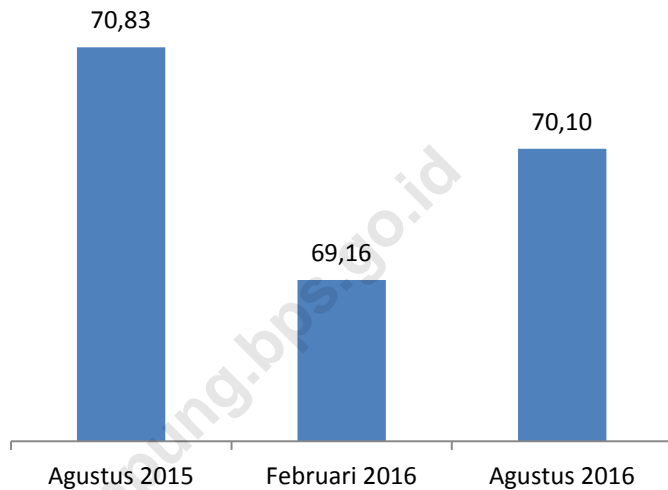
Status Pekerjaan Utama	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	25.43	28,04	26.78	
Berusaha	55.09	53.50	53.18	
Pengusaha	3.75	2.80	3.11	
Berusaha Sendiri dan Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	37.66	38.68	39.17	
Pekerja Bebas	13.68	12.01	10.90	
Pekerja Keluarga	19.49	18.46	20.03	
Total	100.00	100.00	100.00	

Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2016 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Agustus 2015 dan Februari 2016). Berdasarkan Tabel 1, persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (53,18 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (26,78 persen), dan urutan tiga yaitu status penduduk dengan status pekerja keluarga / tak dibayar (20.03 persen).

Pada Tabel 1, penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mengalami penurunan sebesar 1,26 persen poin untuk periode Februari-Agustus 2016. Untuk status berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar mengalami

kenaikan sebesar 0,49 persen poin, sedangkan urutan tiga yaitu status penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga/tak dibayar mengalami kenaikan sebesar 1,57 persen poin dan seterusnya.

Grafik 8.
Persentase
Pekerja Rentan,
2015-2016



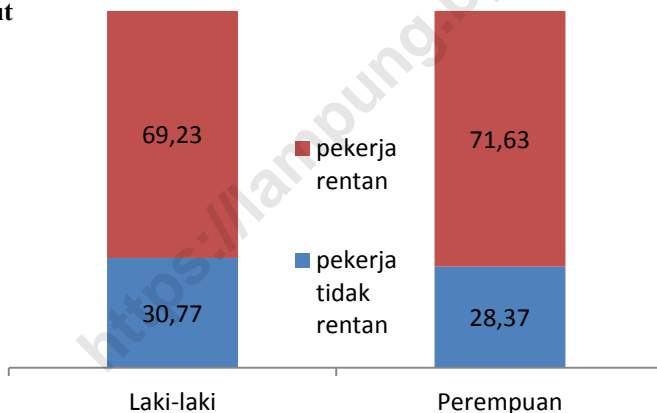
Jika dibandingkan dengan periode setahun yang lalu (Agustus 2015), penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 1,35 persen poin, untuk status berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar mengalami kenaikan sebesar 1,51 persen poin, sedangkan urutan tiga yaitu status penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga/tak dibayar mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen poin.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment* mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga pada Agustus 2016 mencapai 70,10 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 70

orang yang masuk kategori pekerja rentan mengalami penurunan persentase pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 pekerja rentan sebesar 70,83 persen sedangkan Februari 2016 pekerja rentan sebesar 69,16 persen mengalami penurunan sebesar 1,67 persen poin dan pada Agustus 2016 pekerja rentan sebesar 70,10 persen mengalami kenaikan sebesar 0,94 persen poin.

“Sebagian besar perempuan masuk kategori pekerja rentan”

Grafik 9.
Persentase Pekerja
Rentan Menurut
Jenis Kelamin,
Agustus 2016



Berdasarkan hasil Sakernas 2016, pada pekerja perempuan proporsi pekerja rentan sebesar 71,63 persen, yang berarti hampir dua pertiga pekerja perempuan masuk kategori rentan. Sementara pada laki-laki tidak jauh berbeda walaupun lebih rendah dari pekerja rentan perempuan sebesar 69,23 persen.

KILM 4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

“Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian”

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Provinsi Lampung pada Agustus 2016 masih mempunyai pola yang sama dengan Agustus 2015 dan Februari 2016, yaitu didominasi oleh sektor pertanian dengan persentase penduduk bekerja pada sektor pertanian sebesar 48,28 persen. Selanjutnya adalah sektor jasa-jasa sebesar 37,13 persen, dan sektor manufaktur sebesar 14,59 persen.

Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2015-2016

Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	48.78	48.23	48.28
Manufaktur	16.20	15.23	14.59
Pertambangan	0.79	0.54	0.44
Industri	9.12	9.74	8.42
Listrik, Air dan Gas	0.16	0.25	0.13
Konstruksi			
Bangunan	6.13	4.7	5.6
Jasa-jasa	35.02	36.54	37.13
Perdagangan	18.86	19.47	19.16
Transportasi	3.39	3.6	3.31
Keuangan	1.52	1.75	1.32
Jasa			
Kemasyarakatan	11.25	11.72	13.34
Total	100.00	100.00	100.00

Apabila dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (19,16 persen) dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan (13,34 persen). Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesar adalah sektor industri dan konstruksi masing-masing sebesar 8,42 persen dan 5,6 persen.

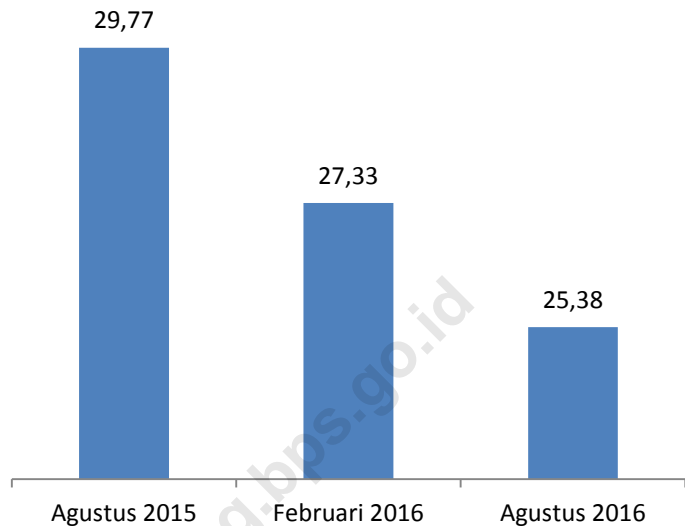
Sektor pertanian pada hasil Sakernas Agustus 2015 ke Februari 2016 mengalami penurunan sebesar 0,55 persen poin dan mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen poin pada hasil Sakernas Februari 2016 ke Agustus 2016. Sedangkan sektor jasa pada hasil Sakernas Agustus 2015 ke Februari 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen poin dan mengalami kenaikan lagi sebesar 0,59 persen poin pada hasil Sakernas Februari 2016 ke Agustus 2016. Sektor manufaktur pada hasil Sakernas Agustus 2015-2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,97 persen poin dan 0,64 persen poin.

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktifitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

“Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 25,38 persen”

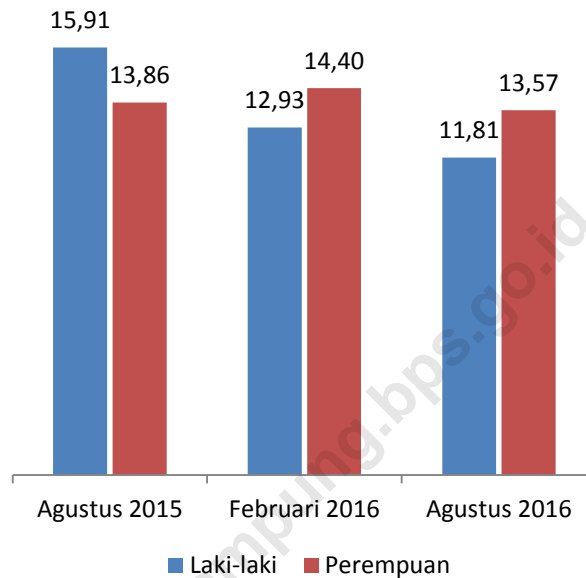
Grafik 10.
Tingkat Pekerja
Paruh Waktu,
2015-2016



Pada Agustus 2016, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 25,38 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat 25 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan terhadap Februari 2016 sebesar 1,95 persen poin dan penurunan cukup besar terhadap Agustus 2015 sebesar 4.39 persen poin.

“Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dari pada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki”

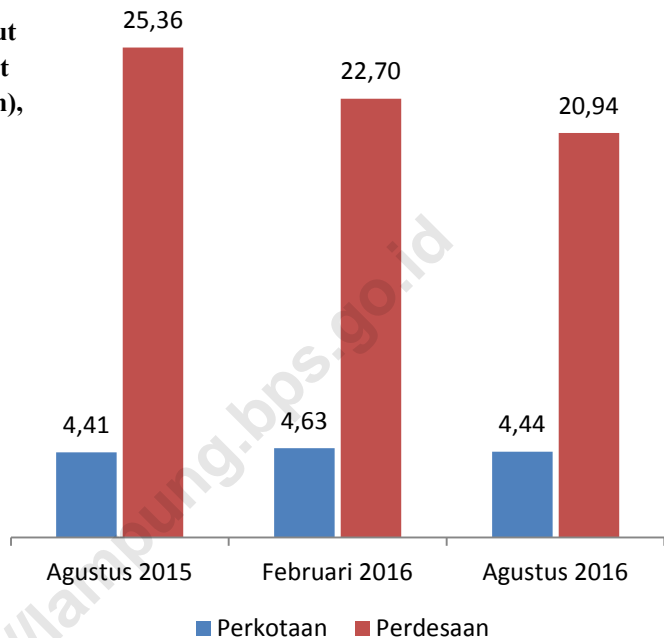
Grafik 11. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2016



Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing –masing sebesar 13,57 persen dan 11,81 persen. Apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, tingkat pekerja paruh waktu perempuan dan laki-laki pada Agustus 2016 masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin perempuan dan 0,83 persen poin laki-laki, sedangkan dengan keadaan Agustus 2015, tingkat pekerja paruh waktu perempuan pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebesar 0,29 persen poin perempuan dan 4,10 persen poin laki-laki.

“Tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan dan perkotaan mengalami penurunan”

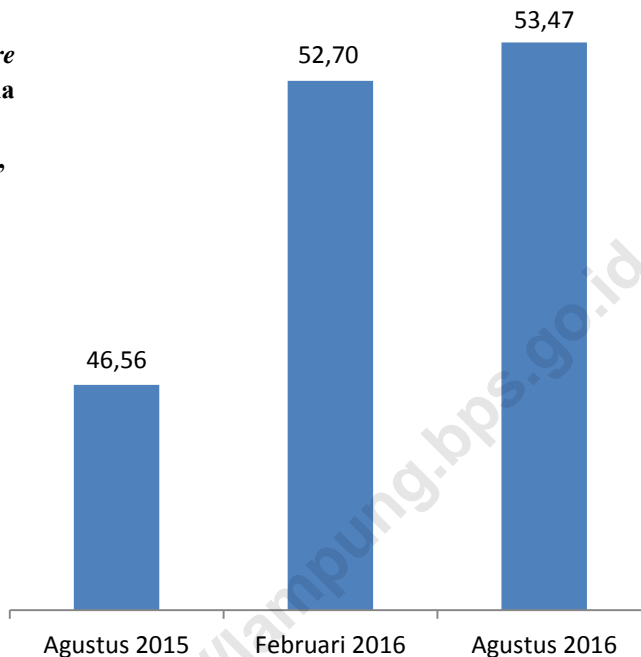
Grafik 12. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2015-2016



Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan pada Agustus 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan periode Februari 2016 sebesar 0,19 persen poin dan kenaikan dibanding periode Agustus 2015 sebesar 0,03 persen poin. Sedangkan sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan pada periode Februari dan Agustus 2016 masing-masing sebesar 1,76 persen poin dan 4,42 persen poin.

“Share perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 53,47 persen”

Grafik 13. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2013-2016

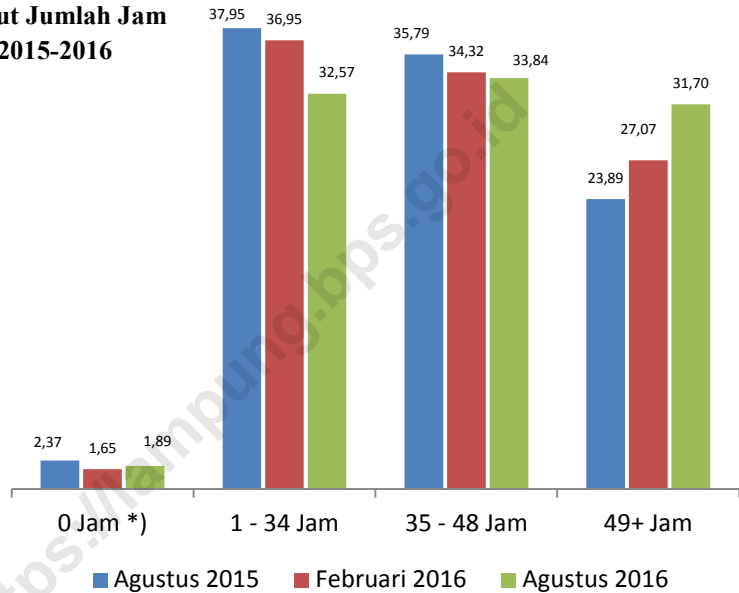


Share perempuan pada pekerja paruh waktu hasil Sakernas Agustus 2016 mencapai 53,47 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 orang pekerja paruh waktu, sekitar 53 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu periode Agustus 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 sebesar 0,77 persen poin dan peningkatan dari keadaan Agustus 2015 sebesar 6,91 persen poin.

KILM 6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

“Mayoritas penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu”

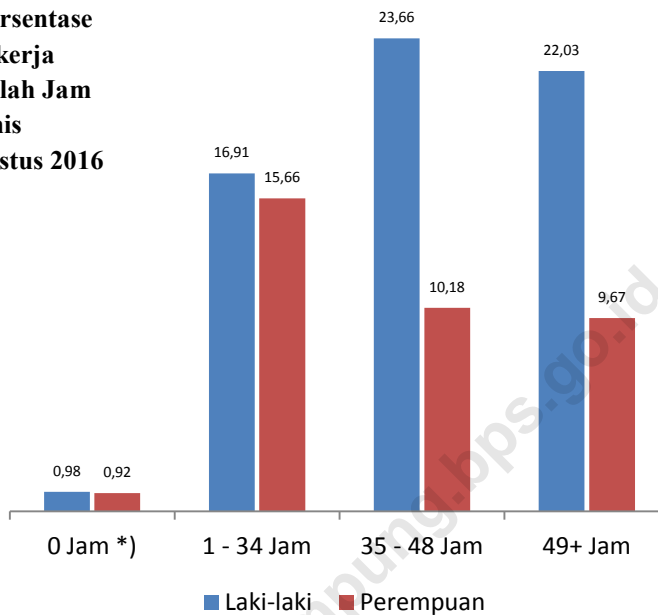
Grafik 14. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2015-2016



Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar 65,54 persen penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 34,46 persen jika dibandingkan dengan Februari 2016 penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar (61,39 persen) mengalami peningkatan sebesar 4,15 persen terhadap hasil Sakernas Agustus 2016. Dan mengalami peningkatan sebesar 5,86 persen poin dibandingkan kondisi Agustus 2015 (59,68 persen).

“Perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan terbesar pada kelompok 1-34 jam”

Grafik 15. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2016

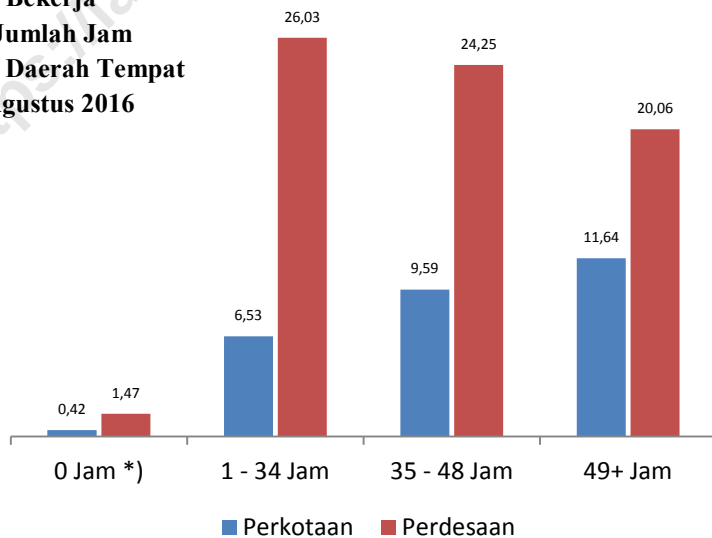


Pada Sakernas Agustus 2016 secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan pada setiap kategori jumlah jam kerja. Persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu hanya 16,57 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama sebesar mencapai 17,89 persen. Sedangkan untuk jam kerja di atas 35 jam per minggu persentase laki-laki cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sakernas Agustus 2016 menunjukkan persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar 19,85 persen, sementara persentase penduduk laki-laki mencapai 45,69 persen.

“Penduduk perdesaan lebih banyak yang bekerja pada setiap kategori jam per minggu dibanding penduduk perkotaan”

Grafik 16. Apabila di amati lebih lanjut, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antar penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja disetiap kelompok jumlah jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 27,51 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 6,95 persen.

Grafik 16. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2016



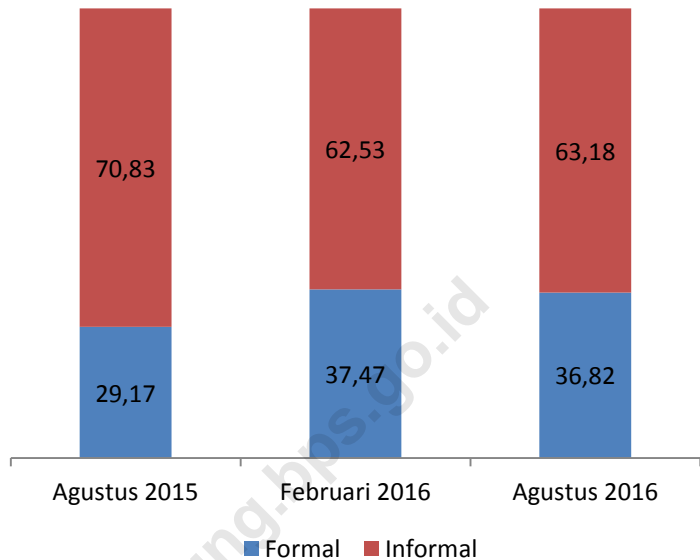
KILM 7. Penduduk Yang Bekerja di Sektor Informal

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

“Mayoritas penduduk di provinsi Lampung bekerja di sektor informal yaitu 63,18 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa dari 3.931,3 ribu orang yang bekerja, sebanyak 63,18 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (2.483 ribu orang).

Grafik 17.
Persentase
Penduduk Bekerja
Formal/Informal,
2015-2016

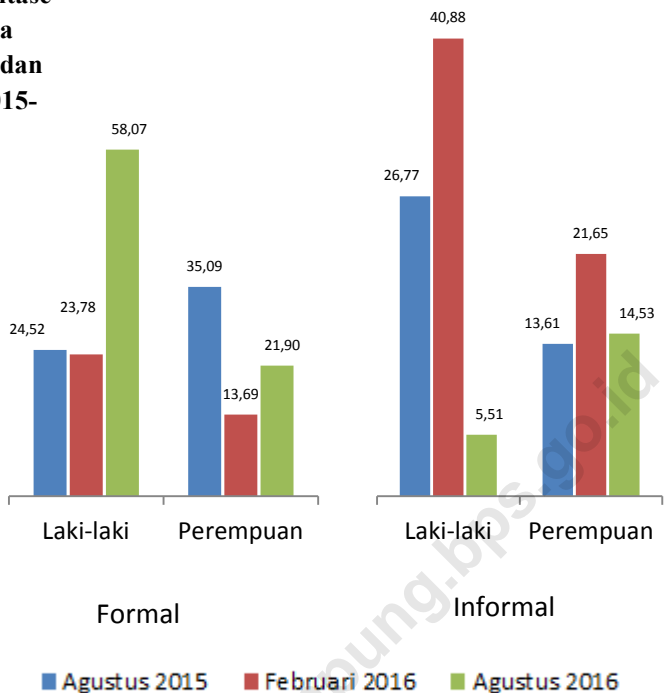


Pada periode Februari 2016 dan Agustus 2015, tampak adanya kenaikan dan penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, namun masih sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor informal. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Februari 2016 sebesar 62,53 persen, naik 0,65 persen dan pada Agustus 2015 sebesar 70,83 persen, turun 7,65 pada Agustus 2016.

“Sektor formal didominasi oleh laki-laki”

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yang mencapai 58,07 persen,

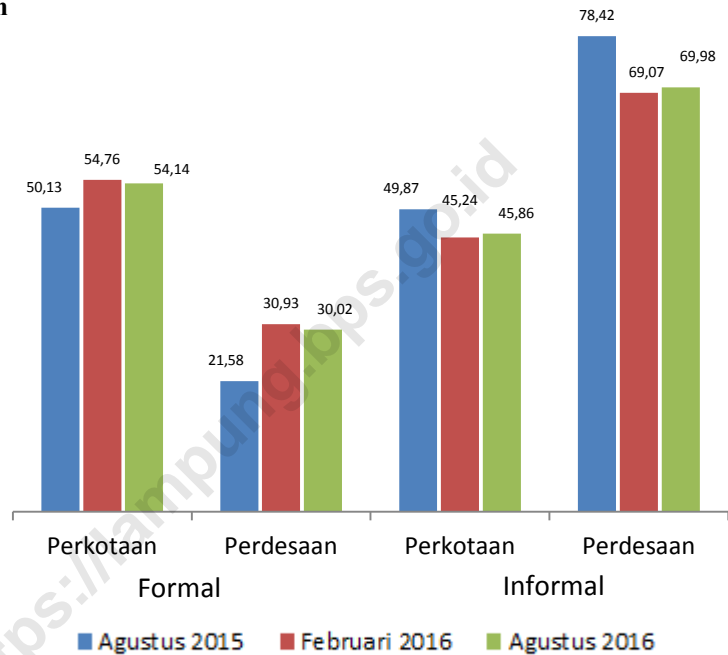
Grafik 18. Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2015-2016



Sedangkan pada Februari 2016 sebesar 23,78 persen, dan Agustus 2015 sebesar 24,52 persen. Sedangkan pada sektor informal kaum perempuan mendominasi walaupun perbedaan dengan kaum laki-laki tidak terlalu besar. Pada Agustus 2016 persentase penduduk informal yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5,51 persen, sedangkan perempuan mencapai 64,56 persen.

“Pekerja di sektor informal lebih banyak tinggal di daerah perdesaan”

Grafik 19. Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016



Berdasarkan Sakernas Agustus 2016, penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 54,14 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 yang mencapai 54,76 persen. Begitu pula bila dibandingkan Agustus 2015 juga mengalami peningkatan 4,01 persen poin. Di sisi lain, persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal yang lebih mendominasi adalah daerah perdesaan, dan mengalami penurunan bila dibanding keadaan setahun yang lalu, yaitu 88,58 persen pada Februari 2016 turun menjadi 85,98 persen dan pada Agustus 2015 sebesar 87,31 persen, turun 1,33 persen.

BAB 3

INDIKATOR PENGANGGURAN

KILM 8. Pengangguran

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung Agustus 2016 sebesar 4,62 persen”

Seperti yang terlihat pada Tabel 3, TPT berdasarkan Sakernas Agustus 2016 mencapai 4,62 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di provinsi Lampung, terdapat rata-rata sebanyak 4,62 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa TPT di Provinsi Lampung mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 sebesar 0,06 poin dari 4,54 persen menjadi 4,62 persen, namun bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 mengalami penurunan 0,52 poin dari 5,14 persen menjadi 4,62.

Seiring fluktuasi yang terjadi pada TPT provinsi Lampung baik bila dibandingkan dengan Sakernas Agustus 2015 maupun Februari 2016, TPT berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan adanya fluktuasi. Sebagai Gambaran, TPT perempuan pada periode Agustus 2016 dibandingkan dengan Agustus 2015 mengalami penurunan 1,82 persen poin, dan dibandingkan dengan Februari 2016 juga mengalami penurunan 0,39 persen poin. Begitu pula terjadi pada kelompok laki-laki yang mengalami kenaikan 0,11 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2015 dan naik lagi 0,32 persen poin dibandingkan dengan Februari 2016.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2015-2016

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Laki-laki	4,37	4,15	4,48	4,48
Perempuan	6,68	5,25	4,86	4,86
Perkotaan	7,82	7,17	6,46	6,46
Perdesaan	4,12	3,51	3,87	3,87
Total	5,14	4,54	4,62	4,62

Sementara TPT berdasarkan wilayah tempat tinggal pada periode yang sama, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan pola menurun. TPT di daerah perkotaan mengalami penurunan 1,36 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2015, dan turun lagi 0,71 persen poin dibandingkan periode Februari 2016. Sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2015, namun mengalami kenaikan 0,37 persen poin dibandingkan dengan periode Februari 2016.

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda

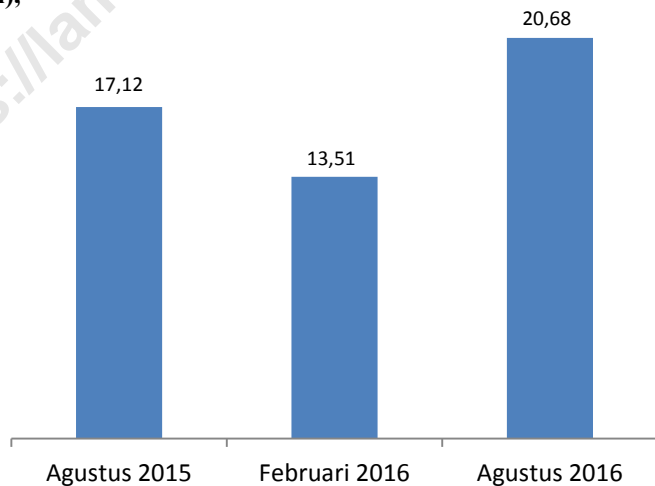
Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak Kabupaten/Kota yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “umur muda” mencakup orang yang berumur 15 sampai dengan 24 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun

keatas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran kaum muda;
2. Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
3. *Share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur;
4. Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

“TPT kelompok umur muda mengalami peningkatan”

**Grafik 20. TPT
Penduduk Umur
Muda (persen),
2015 -2016**

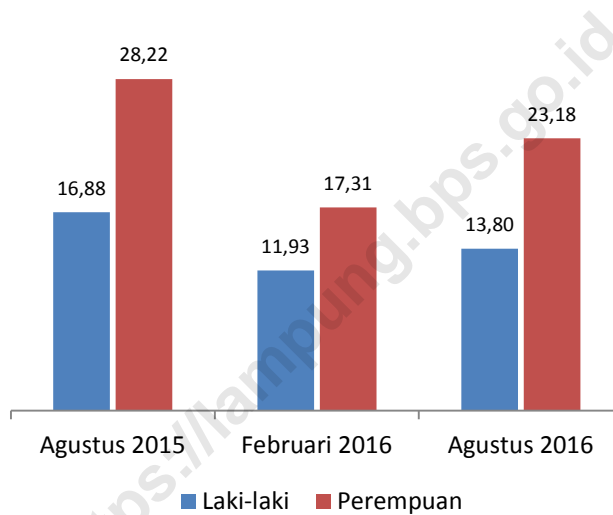


Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 20,68 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 21

orang yang menganggur. Angka tersebut bila dibandingkan dengan Februari 2016 dan Agustus 2015 masing-masing mengalami kenaikan 3,56 dan 7,17 persen poin.

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki”

Grafik 21. TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), 2015 - 2016



Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2016, TPT penduduk umur muda pada perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk perempuan umur 15-24 tahun lebih banyak yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja daripada laki-laki di umur yang sama. Akan tetapi, pada Agustus tahun 2015 TPT penduduk umur muda perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

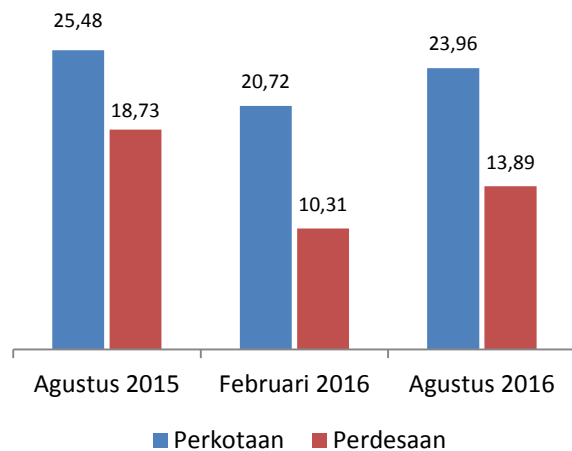
Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa keadaan TPT

umur muda pada Agustus 2016 mengalami kenaikan pada kelompok laki-laki maupun pada kelompok perempuan, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016. Sedangkan bila dibandingkan keadaan TPT umur muda pada Agustus 2015 mengalami penurunan pada kelompok laki-laki sebesar 3,08 persen poin, sedangkan kelompok perempuan juga mengalami penurunan sebesar 5,04 persen poin.

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi di wilayah perkotaan dibanding perdesaan”

Sementara itu lebih ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan.

Grafik 22. TPT Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2015 -2016



Sejak Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2016 TPT umur muda wilayah perkotaan mengalami fluktuasi, sama halnya

untuk wilayah perdesaan. Seperti pada Agustus 2016, TPT daerah perkotaan mencapai 23,69 persen poin, sementara di daerah perdesaan sebesar 13,89 persen poin. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 24 orang yang menganggur, sementara untuk daerah perdesaan sekitar 14 orang.

“TPT kelompok umur muda delapan kali lipat lebih tinggi dari pada TPT dewasa”

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Agustus 2016 sebesar 8,13 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda hampir delapan kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Bila di lihat pada tabel 4, TPT umur muda terhadap TPT dewasa mengalami kenaikan 3,25 pada Agustus 2016 jika dibandingkan dengan Februari 2016, namun mengalami penurunan 2,42 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2015. Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Kondisi ini sama dengan keadaan Februari 2016 dan Agustus 2015. Menurut kategori kota-desa, rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan pada Agustus 2016 dan Februari 2016, berbeda dengan kondisi Agustus 2015 dimana perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Sebagai contoh, pada Agustus 2016 rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa di daerah perkotaan sebesar 9,78 sementara di daerah perdesaan hanya 7,05.

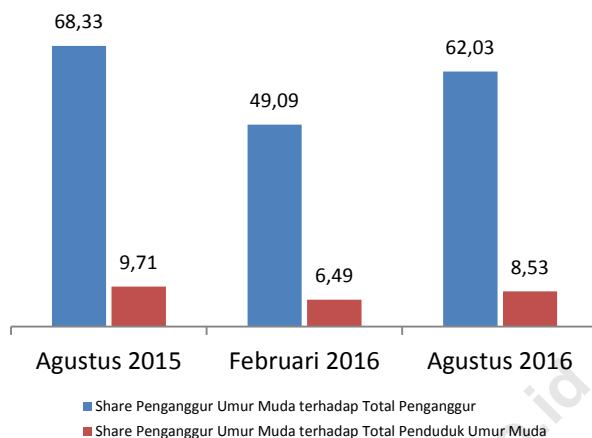
Tabel 4. Indikator Pengangguran Umur Muda di Provinsi Lampung, 2015-2016

Indikator	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	9,22	4,91	5,38
Perempuan	12,71	5,16	17,60
Perkotaan	6,41	4,93	9,78
Perdesaan	15,45	4,64	7,05
Total	10,55	4,88	8,13

“Share penganggur umur muda terhadap total 62,03 persen sementara *share* penganggur terhadap total penduduk umur muda 8,53 persen”

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 cukup tinggi yaitu 62,03 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2016, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 62 orang penganggur yang berumur 15 sampai 24 tahun.

Grafik 23. Share Penganggur Umur Muda (persen), 2015 -2016



Angka ini mengalami peningkatan sebesar 12,94 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2016, namun turun sebesar 6,30 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2015. Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2016 sebesar 8,53 persen, hal ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2016 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 9 orang diantaranya merupakan penganggur yang berumur 15 sampai 24 tahun. Angka ini mengalami peningkatan 2,04 persen poin jika dibandingkan dengan angka Februari 2016, namun mengalami penurunan 1,18 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2015

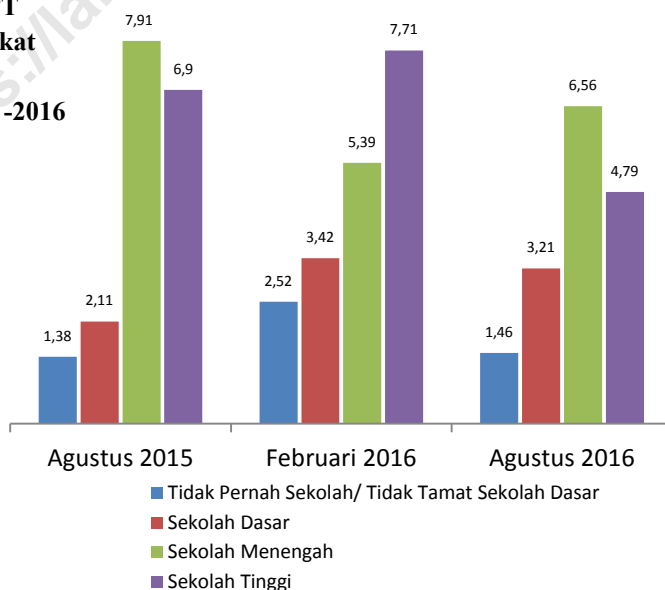
KILM 11. Pengangguran Dan Pendidikan

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai

perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan dalam dunia pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (low skilled job) di dalam negeri. Selain itu, apabila *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi, dapat menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

“TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan terdapat pada sekolah menengah”

Grafik 24. TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015 -2016



Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 6,56 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah tamat sekolah dasar dengan TPT sebesar 1,46 persen.

“Dibanding kondisi Februari 2016, terjadi fluktuasi TPT hampir pada semua jenjang pendidikan”

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015-2016.

Tingkat Pendidikan	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat Sekolah Dasar	1,38	2,52	1,46	
Laki-laki	0,63	1,76	1,93	
Perempuan	1,54	3,59	1,34	
Perkotaan	1,32	3,21	1,61	
Perdesaan	1,49	2,37	1,25	
Sekolah Dasar	2,11	3,42	3,21	
Laki-laki	3,91	3,00	6,17	
Perempuan	1,73	4,22	2,43	
Perkotaan	2,04	6,74	3,98	
Perdesaan	2,27	2,48	1,81	
Sekolah Menengah	7,91	5,39	6,56	
Laki-laki	10,68	5,05	8,03	
Perempuan	6,59	6,16	5,86	
Perkotaan	6,49	8,39	5,70	
Perdesaan	11,22	3,95	8,31	
Sekolah Tinggi	6,90	7,71	4,79	
Laki-laki	6,30	8,69	4,91	
Perempuan	7,71	7,02	4,67	
Perkotaan	5,59	6,10	4,29	
Perdesaan	8,27	9,17	5,26	
Total	5,14	4,54	4,62	

Meskipun TPT Provinsi Lampung mengalami kenaikan secara total pada Agustus 2016 terhadap Februari 2016, justru dilihat pada jenjang pendidikan terjadi fluktuasi TPT pada hampir pada semua jenjang pendidikan. Perbedaan nilai TPT yang sangat besar terjadi pada kelompok sekolah tinggi.

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT periode Agustus 2016 pada tingkat pendidikan sekolah menengah dibandingkan dengan Februari 2016 tampak lebih nyata terjadi pada kelompok jenis kelamin laki-laki. Peningkatan TPT sekolah menengah pada laki-laki sebesar 2,98 persen poin, sedangkan pada perempuan justru terjadi penurunan sebesar 0.3 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa terjadi penurunan dikelompok perkotaan sebesar 2,69 persen poin dan sebaliknya di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 4,36 persen poin.

“Dibanding kondisi Agustus 2015, terjadi penurunan TPT pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan tinggi, sedangkan pada kelompok tidak pernah sekolah/tidak tamat sekolah dasar dan kelompok sekolah dasar terjadi peningkatan TPT”

Sementara itu jika dibandingkan dengan keadaan setahun sebelumnya peningkatan TPT terjadi pada kelompok tidak pernah sekolah/tidak tamat sekolah dasar dan kelompok sekolah dasar. Dan sebaliknya, pada kelompok sekolah menengah dan sekolah tinggi terjadi penurunan TPT. TPT sekolah menengah pada Agustus 2015 sebesar 7,91 menurun menjadi 6,56 pada Agustus 2016. Hal yang sama dengan

kelompok sekolah tinggi turun dari 6,90 pada Agustus 2015 menjadi 4,79 pada Agustus 2016.

“Persentase penganggur tertinggi terdapat pada tingkat Sekolah Menengah”

Tabel 6. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016

Tingkat Pendidikan	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat Sekolah				
Dasar	4,07	9,71	5,35	
Laki-laki	0,77	6,75	1,45	
Perempuan	6,44	13,94	3,89	
Perkotaan	4,23	4,90	3,49	
Perdesaan	3,86	13,58	1,85	
Sekolah Dasar	12,23	19,99	19,54	
Laki-laki	9,58	19,51	7,88	
Perempuan	14,12	20,69	11,66	
Perkotaan	14,08	19,50	15,65	
Perdesaan	9,77	20,39	3,89	
Sekolah Menengah	74,86	56,92	66,85	
Laki-laki	78,54	63,21	26,47	
Perempuan	72,23	47,92	40,38	
Perkotaan	75,25	64,28	38,86	
Perdesaan	74,34	50,99	27,99	
Sekolah Tinggi	8,84	13,38	8,26	
Laki-laki	11,11	10,54	4,41	
Perempuan	7,22	17,45	3,85	
Perkotaan	6,43	11,32	3,54	
Perdesaan	12,02	15,04	4,72	

Sementara itu, komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan yang terlihat pada Tabel 6, memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Pada

Agustus 2016 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah menengah.

Pada Agustus 2016, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah menengah mencapai 66,85 persen, jika dibandingkan Februari 2016 (56,92) dan Agustus 2015 (74,86) masing-masing mengalami kenaikan sebesar 9,93 persen poin dari kondisi Februari 2016 dan penurunan sebesar 8,01 persen poin dibandingkan Agustus 2015. Selama periode Agustus 2015-Agustus 2016, terjadi fluktuasi persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan sekolah.

“Persentase penganggur berpendidikan sekolah tinggi pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan”

Mengamati lebih lanjut tabel 6 keadaan Agustus 2016, persentase laki-laki yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Agustus 2016, diantara seluruh penganggur laki-laki yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 4,41 persen, sementara diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 3,85 persen.

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2016, persentase penduduk pedesaan yang menganggur dengan jenjang sekolah tinggi lebih tinggi di wilayah perkotaan apabila dibandingkan dengan pedesaan. Dan untuk sekolah dasar lebih tinggi persentase penduduk perkotaan daripada wilayah pedesaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada tabel 6, persentase pada

Agustus 2016 penduduk pedesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 1,85 persen dan 3,89 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 3,49 persen dan 15,65 persen.

KILM 12. Setengah Penganggur

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

“Jumlah setengah penganggur di Provinsi Lampung mencapai 282 ribu orang, dan mengalami penurunan dibanding Februari 2016”

Jumlah setengah penganggur di Provinsi Lampung berdasarkan Sakernas Agustus 2016, mencapai 282.390 orang (tabel 7), yang terdiri dari 82.270 orang berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 200.120 orang adalah laki-laki. Jika dilihat menurut klasifikasi daerah tempat tinggal, pada Agustus 2016, jumlah setengah penganggur di perkotaan mencapai 81.922 orang, sementara di perdesaan sebanyak 200.468 orang.

Tabel 7. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2015-2016

Setengah Penganggur	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	297 435	370 866	282 390
Laki-Laki	212 527	257 581	200 468
Perempuan	84 908	113 285	81 922
Perkotaan	64 327	64 778	82 270
Perdesaan	233 108	306 088	200 120

Pada periode Sakernas Agustus 2016 menunjukkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sebanyak 88.476 orang dibandingkan Februari 2016. Penurunan jumlah setengah penganggur tersebut lebih banyak pada laki-laki yaitu sebanyak 57.113 orang, sedangkan perempuan jumlah setengah penganggur mengalami penurunan bila dibandingkan dengan sakernas Februari 2016 sebanyak 31.363 orang.

“Persentase setengah penganggur Agustus 2016 terhadap total angkatan kerja maupun terhadap total penduduk bekerja cenderung menurun dibanding periode Februari 2016”

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2016 sebesar 6,85 persen yang berarti dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 7 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

Tren persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja selama periode Agustus 2015-Agustus 2016 berfluktuasi. Dari sebesar 7,76 persen pada Agustus 2015 naik

menjadi 9,18 persen pada Februari 2016, namun kemudian mengalami penurunan pada Agustus 2016 menjadi 6,85 persen.

Tabel 8. Indikator Setengah Penganggur, 2015-2016

Setengah Penganggur	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Setengah Penganggur terhadap Total Angkatan Kerja	7,76	9,18	6,85
Laki-Laki	8,29	9,90	3,14
Perempuan	6,70	7,88	13,30
Perkotaan	6,13	5,68	16,92
Perdesaan	8,38	10,56	2,79
Persentase Setengah Penganggur terhadap Total Penduduk Bekerja	8,18	9,62	7,18
Laki-Laki	8,67	10,33	3,29
Perempuan	7,17	8,32	13,98
Perkotaan	6,65	6,12	18,09
Perdesaan	8,74	10,95	2,90

Hal yang sama juga terjadi pada persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja yang juga berfluktuasi selama periode Agustus 2015-Agustus 2016. Pada Agustus 2015, dari total penduduk bekerja, sekitar 8,18 persen diantaranya setengah penganggur. Kemudian pada Februari 2016 naik menjadi sebesar 9,62 persen dan turun pada Agustus 2016 menjadi sebesar 7,18 persen.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin pada periode Agustus 2015-Agustus 2016, penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi kenaikan terjadi pada perempuan. Persentase perempuan setengah penganggur

terhadap total perempuan bekerja pada Agustus 2015 sebesar 6,70 persen naik sebesar 6,60 persen poin terhadap Sakernas Agustus 2015. Bila dibandingkan pada Sakernas Februari 2016 terhadap Sakernas Agustus 2016 menjadi sebesar 6,85 persen turun 2,33 persen poin. Sedangkan persentase laki-laki setengah penganggur mengalami fluktuasi, bila dibandingkan Sakernas Agustus 2015 naik sebesar 1,61 persen poin terhadap Sakernas Februari 2016, sedangkan Sakernas Februari 2016 terhadap Sakernas Agustus 2016 turun sebesar 6,76 persen poin.

Menilik perbedaan klasifikasi wilayah daerah tempat tinggal, selama periode Agustus 2015-Agustus 2016 fluktuasi persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja juga terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pada Agustus 2016 bila dibandingkan dengan Februari 2016, terjadi kenaikan drastis sebesar 11,24 persen poin di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan terjadi penurunan sangat besar juga sebesar 7,77 persen poin. Pada Agustus 2016 bila dibandingkan dengan Agustus 2015, terjadi kenaikan sebesar 10,79 persen poin di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan terjadi penurunan sebesar 5,59 persen poin.

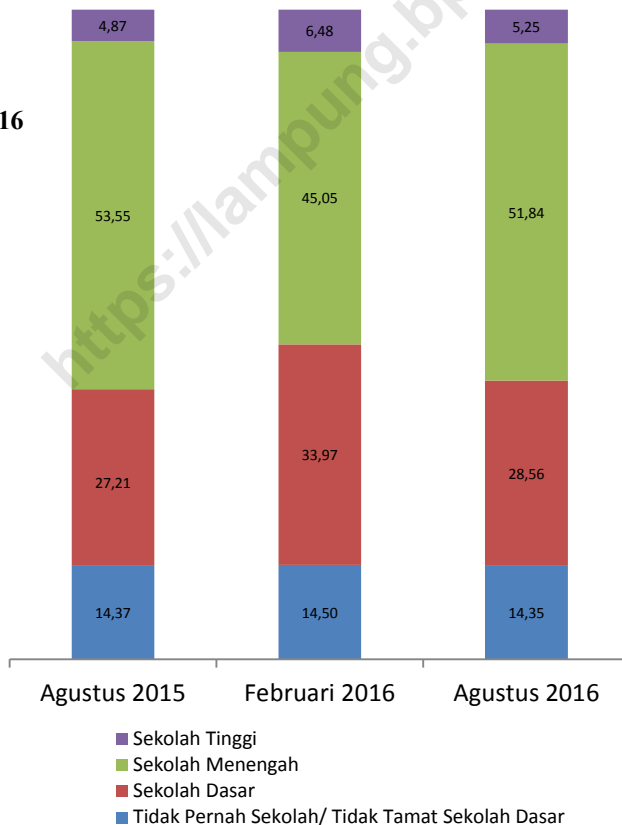
“Persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat sekolah menengah sebesar 51,84 persen”

Masih merujuk pada hasil Sakernas Agustus 2016, persentase setengah penganggur paling tinggi terdapat pada tingkat pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 51,84 persen. Dengan kata lain dari 100 orang setengah penganggur 52 orang diantaranya berpendidikan sekolah menengah. Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2016 terjadi peningkatan

persentase setengah penganggur pada tingkat sekolah menengah yaitu sebesar 6.79 persen poin.

Peningkatan pada tingkat pendidikan sekolah menengah ini sejalan dengan peningkatan persentase setengah penganggur pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yaitu sebesar 4,46 persen poin dan 12,66 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa peningkatan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan masing masing sebesar 18,59 persen poin dan 2,28 persen poin. (tabel 9)

Grafik 25. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015 -2016



Tabel 9. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016

Setengah Penganggur	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat Sekolah				
Dasar	14,37	14,50	14,35	
Laki-laki	12,48	18,15	14,99	
Perempuan	14,89	6,20	12,77	
Perkotaan	14,22	14,72	14,18	
Perdesaan	14,75	14,45	14,41	
Sekolah Dasar	27,21	33,97	28,56	
Laki-laki	17,86	34,80	31,71	
Perempuan	29,80	32,09	20,84	
Perkotaan	26,22	27,81	11,18	
Perdesaan	29,70	35,28	35,71	
Sekolah Menengah	53,55	45,05	51,84	
Laki-laki	59,37	44,20	48,66	
Perempuan	51,94	46,98	59,64	
Perkotaan	56,78	43,35	61,94	
Perdesaan	45,47	45,41	47,69	
Sekolah Tinggi	4,87	6,48	5,25	
Laki-laki	10,30	2,86	4,64	
Perempuan	3,37	14,73	6,75	
Perkotaan	2,78	14,12	12,71	
Perdesaan	10,09	4,87	2,18	

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

“Tingkat ketidakaktifan mencapai 30,39 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, tingkat ketidakaktifan di Provinsi Lampung mencapai 30,39 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 31 orang.

Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2016 turun jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 sebesar 0,98 persen poin dan turun Agustus 2015 sebesar 4,01 persen poin.

Tabel 10. Indikator Ketidakaktifan (persen), 2015-2016

Tingkat Ketidakaktifan	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	20,97	13,84	13,82
Perempuan	48,56	49,83	47,83
Perkotaan	25,79	33,80	31,74
Perdesaan	37,87	30,36	29,83
Total	34,40	31,37	30,39

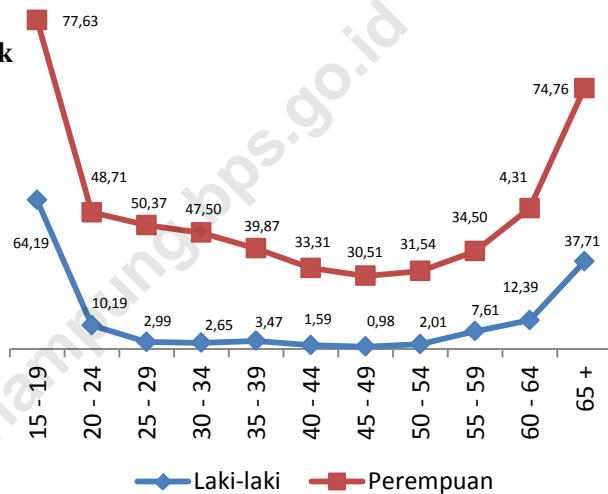
Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 14 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 48 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan pada perempuan sebesar 2,00 persen poin, sedangkan pada laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin.

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Pada Agustus 2016 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 31,74 persen, sementara di daerah pedesaan hanya sebesar 29,83 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebesar 2,06 persen poin bila

dibandingkan keadaan Februari 2016. Begitupun di daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin Februari 2016, yaitu dari 31,37 persen pada Februari 2016 menjadi 30,39 pada Agustus 2016.

“Tingkat ketidakaktifan pada umur muda paling tinggi”

Grafik 26. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2016



Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada grafik mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf “J”).

Berdasarkan grafik diatas, secara umum tingkat ketidakaktifan menurut kelompok umur pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pada Agustus 2016, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15-19) tahun mencapai 64,19 persen terus mengalami penurunan hingga

mencapai 0,98 persen pada kelompok umur (45-49) tahun, dan kembali meningkat pada kelompok umur (50-54) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15-19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 77,63 persen, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (45-49) tahun yaitu sebesar 30,51 persen, dan kembali meningkat pada kelompok umur (50-54) tahun.

<https://lampung.bps.go.id>

BAB 4

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu Kabupaten untuk bersaing dengan sukses di pasar level provinsi maupun dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *internasional Standard Classification of education (ISCED)*

“Angkatan kerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah yaitu sebesar 47,03 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, secara provinsi Lampung tidak terdapat perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas Februari 2016. Angkatan kerja pada Agustus 2016 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang tamat sekolah menengah yaitu sebesar 47,03 persen. Sementara itu, angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah dasar sebesar 28,10 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar

7,96 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 16,91 persen.

Tabel 11. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016

Tingkat Pendidikan	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat Sekolah Dasar	15,11	17,51	16,91
Laki-laki	14,04	15,94	15,82
Perempuan	17,28	20,37	18,81
Perkotaan	9,48	10,96	12,08
Perdesaan	17,24	20,09	18,86
Sekolah Dasar	29,72	26,58	28,10
Laki-laki	30,20	27,03	28,60
Perempuan	28,73	25,75	27,24
Perkotaan	19,19	20,75	20,50
Perdesaan	33,69	28,87	31,17
Sekolah Menengah	48,59	48,02	47,03
Laki-laki	50,73	51,99	49,57
Perempuan	44,27	40,84	42,61
Perkotaan	57,54	54,99	52,99
Perdesaan	45,22	45,28	44,62
Sekolah Tinggi	6,58	7,89	7,96
Laki-laki	5,03	5,03	6,02
Perempuan	9,71	13,05	11,33
Perkotaan	13,79	13,31	14,43
Perdesaan	3,86	5,75	5,35

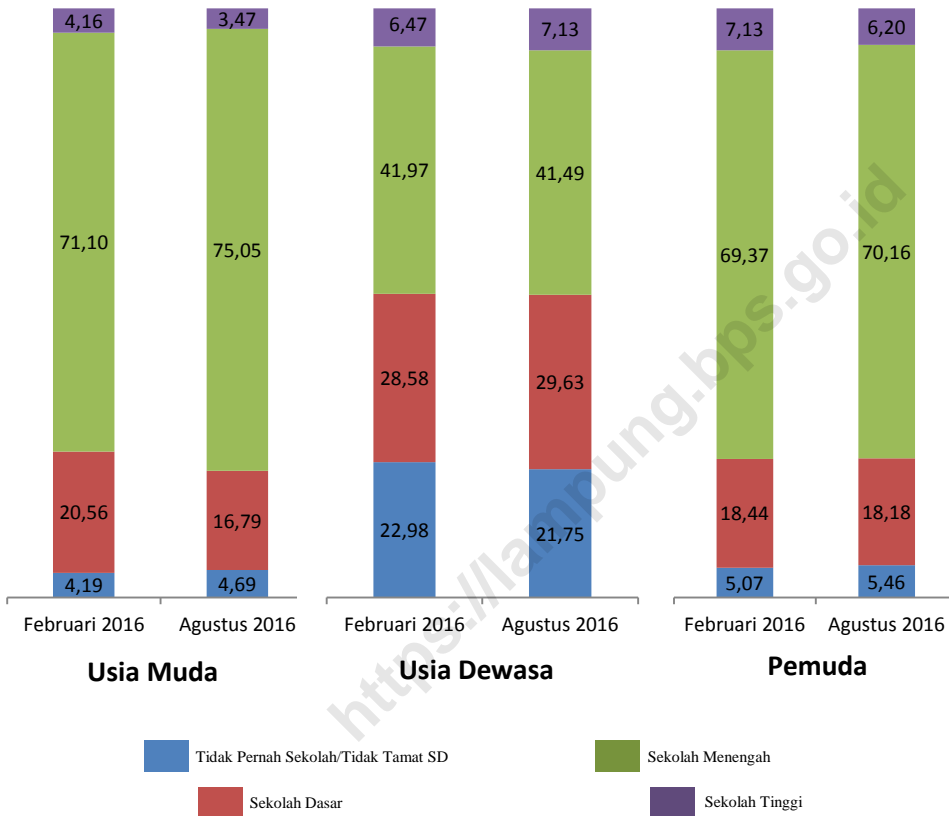
Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Agustus 2016, persentase angkatan kerja

perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki. Untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 11,33 persen dibandingkan 6,02 persen.

“Masih terdapat angkatan kerja usia muda dan pemuda yang tidak pernah sekolah ”

Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur muda dan dewasa dimana angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan dewasa, masih terdapat angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

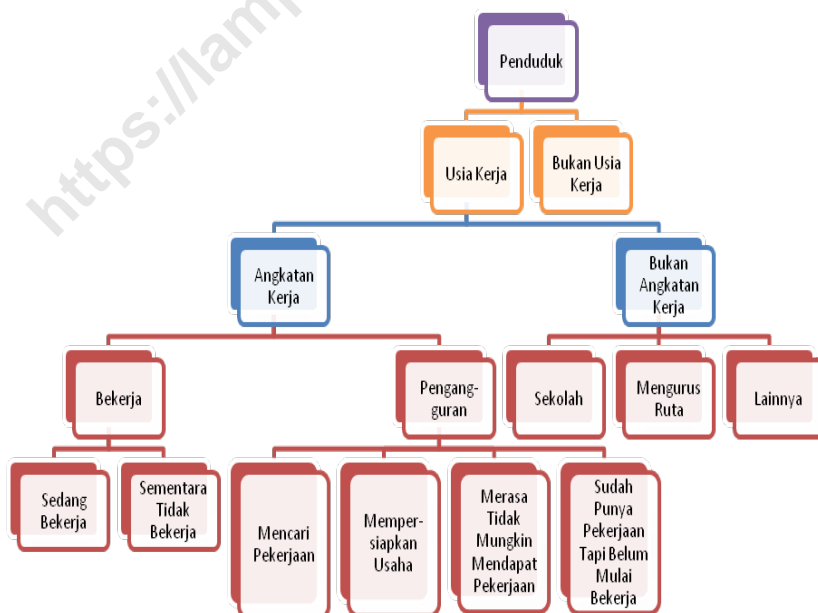
Grafik 27. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari 2016 dan Agustus 2016



Penjelasan Teknis

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment. An ILO Manual on Concepts and Methods*”, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)). Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumur dan lainnya.

Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/ karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus

asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk

periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia. Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, stand-by work dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi. Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan the one hour criterion, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization- ILO*) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, underemployment (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran), KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/underemployment), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan

Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);

6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (KILM 6th ed) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun ke atas.

Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja.

Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini dapat tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini,

sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar;

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari:
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: A (*Agriculture*)/Sektor Pertanian, M (*Manufacture*)/Sektor Manufaktur dan S (*Services*)/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka

yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal

sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal

(Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan.

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi dapat menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat

sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan dapat berupa distribusi dan dapat berupa rate.

KILM 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

1. Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan $100 - \text{TPAK}$ (1–TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi

untuk wanita umur 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita dapat berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

Di samping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15-24 tahun), pemuda (16-30 tahun) dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah) yang bukan merupakan bagian dari Sakernas yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi *L* (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output

yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor sehingga tidak dapat ditampilkan dalam publikasi ini.

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan.

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

Lampiran

<https://lampung.bps.go.id>

**Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut
Kelompok Umur, 2015-2016**

Kelompok Umur	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	
(1)	(2)	(3)	(4)	
15 Tahun Keatas	5 841 965	5 884 265	5 921 182	
Laki-laki	2 996 647	3 018 598	3 036 325	
Perempuan	2 845 318	2 865 667	2 884 857	
Perkotaan	1 677 615	1 722 393	1 735 621	
Perdesaan	4 164 350	4 161 872	4 185 561	
(15-64)	5 438 528	5 473 366	5 505 646	
Laki-laki	2 798 700	2 816 592	2 832 192	
Perempuan	2 639 828	2 656 774	2 673 454	
Perkotaan	1 574 726	1 615 246	1 627 090	
Perdesaan	3 863 802	3 858 120	3 878 556	
(15-24)	1 385 581	1 387 368	1 383 916	
Laki-laki	715 635	717 109	715 520	
Perempuan	669 946	670 259	668 396	
Perkotaan	421 106	429 356	429 029	
Perdesaan	964 475	958 012	954 887	
(25+)	4 456 384	4 496 897	4 537 266	
Laki-laki	2 281 012	2 301 489	2 320 805	
Perempuan	2 175 372	2 195 408	2 216 461	
Perkotaan	1 256 509	1 293 037	1 306 592	
Perdesaan	3 199 875	3 203 860	3 230 674	
(25-54)	3 479 135	3 498 284	3 517 925	
Laki-laki	1 780 692	1 790 293	1 800 324	
Perempuan	1 698 443	1 707 991	1 717 601	
Perkotaan	996 967	1 021 999	1 029 421	
Perdesaan	2 482 168	2 476 285	2 488 504	
(25-34)	1 316 010	1 317 132	1 314 223	
Laki-laki	674 710	675 647	674 586	
Perempuan	641 300	641 485	639 637	
Perkotaan	380 180	387 872	387 636	
Perdesaan	935 830	929 260	926 587	
(35-54)	2 163 125	2 181 152	2 203 702	
Laki-laki	1 105 982	1 114 646	1 125 738	
Perempuan	1 057 143	1 066 506	1 077 964	
Perkotaan	616 787	634 127	641 785	
Perdesaan	1 546 338	1 547 025	1 561 917	
(55-64)	573 812	587 714	603 805	
Laki-laki	302 373	309 190	316 348	
Perempuan	271 439	278 524	287 457	
Perkotaan	156 653	163 891	168 640	
Perdesaan	417 159	423 823	435 165	
(65 Tahun Keatas)	403 437	410 899	415 536	
Laki-laki	197 947	202 006	204 133	
Perempuan	205 490	208 893	211 403	
Perkotaan	102 889	107 147	108 531	
Perdesaan	300 548	303 752	307 005	

**Lampiran 2. Penduduk yang Bekerja Menurut
Kelompok Umur, 2015-2016**

Kelompok Umur	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun			
Keatas yang Bekerja	3 635 258	3 854 815	3 931 321
Laki-Laki	2 451 818	2 492 700	2 499 383
Perempuan	1 183 440	1 362 115	1 431 938
Perkotaan	967 223	1 058 382	1 108 254
Perdesaan	2 668 035	2 796 433	2 823 067
Umur Muda (15-24) yang Bekerja	516 011	190 004	571 670
Laki-Laki	359 734	152 106	384 144
Perempuan	156 277	37 898	187 526
Perkotaan	140 033	36 862	167 975
Perdesaan	375 978	153 142	403 695
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	3 119 247	2 007 569	3 359 651
Laki-Laki	2 092 084	1 349 621	2 115 239
Perempuan	1 027 163	657 948	1 244 412
Perkotaan	827 190	567 202	940 279
Perdesaan	2 292 057	1 440 367	2 419 372

**Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas
yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut
Kelompok Umur, 2015-2016**

Kelompok Umur	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun Keatas	3 832 108	4 038 314	4 121 668
Laki-laki	2 563 914	2 600 718	2 616 555
Perempuan	1 268 194	1 437 596	1 505 113
Perkotaan	1 049 317	1 140 167	1 184 800
Perdesaan	2 782 791	2 898 147	2 936 868
(15-64)	3 662 300	3 858 139	3 941 163
Laki-laki	2 442 716	2 477 351	2 489 402
Perempuan	1 219 584	1 380 788	1 451 761
Perkotaan	1 014 479	1 103 726	1 149 404
Perdesaan	2 647 821	2 754 413	2 791 759
(15-24)	650 516	666 774	689 733
Laki-laki	432 806	471 365	445 635
Perempuan	217 710	195 409	244 098
Perkotaan	187 908	204 914	220 900
Perdesaan	462 608	461 860	468 833
(25+)	3 181 592	3 371 540	3 431 935
Laki-laki	2 131 108	2 129 353	2 170 920
Perempuan	1 050 484	1 242 187	1 261 015
Perkotaan	861 409	935 253	963 900
Perdesaan	2 320 183	2 436 287	2 468 035
(25-54)	2 607 458	2 749 311	2 793 614
Laki-laki	1 739 787	1 735 878	1 757 891
Perempuan	867 671	1 013 433	1 035 723
Perkotaan	729 443	790 455	810 590
Perdesaan	1 878 015	1 958 856	1 983 024
(25-34)	934 444	978 045	982 150
Laki-laki	653 198	652 515	655 530
Perempuan	281 246	325 530	326 620
Perkotaan	269 357	297 505	295 217
Perdesaan	665 087	680 540	686 933
(35-54)	1 673 014	1 771 266	1 811 464
Laki-laki	1 086 589	1 083 363	1 102 361
Perempuan	586 425	687 903	709 103
Perkotaan	460 086	492 950	515 373
Perdesaan	1 212 928	1 278 316	1 296 091
(55-64)	404 326	442 054	457 816
Laki-laki	270 123	270 108	285 876
Perempuan	134 203	171 946	171 940
Perkotaan	97 128	108 357	117 914
Perdesaan	307 198	333 697	339 902
(65 Tahun Keatas)	169 808	180 175	180 505
Laki-laki	121 198	123 367	127 153
Perempuan	48 610	56 808	53 352
Perkotaan	34 838	36 441	35 396
Perdesaan	134 970	143 734	145 109

**Lampiran 4. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Kelompok Umur (persen), 2015-2016**

Kelompok Umur	2015		2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun Keatas		65, 6	68, 63	69, 61
Laki-laki		85, 56	86, 16	86, 18
Perempuan		44, 57	50, 17	52, 17
Perkotaan		62, 55	66, 2	68, 26
Perdesaan		66, 82	69, 64	70, 17
(15-64)		67, 34	70, 49	71, 58
Laki-laki		87, 28	87, 96	87, 9
Perempuan		46, 2	51, 97	54, 3
Perkotaan		64, 42	68, 33	70, 64
Perdesaan		68, 53	71, 39	71, 98
(15-24)		46, 95	48, 06	49, 84
Laki-laki		60, 48	65, 73	62, 28
Perempuan		32, 5	29, 15	36, 52
Perkotaan		44, 62	47, 73	51, 49
Perdesaan		47, 96	48, 21	49, 1
(25+)		71, 39	74, 97	75, 64
Laki-laki		93, 43	92, 52	93, 54
Perempuan		48, 29	56, 58	56, 89
Perkotaan		68, 56	72, 33	73, 77
Perdesaan		72, 51	76, 04	76, 39
(25-54)		74, 95	78, 59	79, 41
Laki-laki		97, 7	96, 96	97, 64
Perempuan		51, 09	59, 33	60, 3
Perkotaan		73, 17	77, 34	78, 74
Perdesaan		75, 66	79, 1	79, 69
(25-34)		71, 01	74, 26	74, 73
Laki-laki		96, 81	96, 58	97, 18
Perempuan		43, 86	50, 75	51, 06
Perkotaan		70, 85	76, 7	76, 16
Perdesaan		71, 07	73, 23	74, 14
(35-54)		77, 34	81, 21	82, 2
Laki-laki		98, 25	97, 19	97, 92
Perempuan		55, 47	64, 5	65, 78
Perkotaan		74, 59	77, 74	80, 3
Perdesaan		78, 44	82, 63	82, 98
(55-64)		70, 46	75, 22	75, 82
Laki-laki		89, 33	87, 36	90, 37
Perempuan		49, 44	61, 73	59, 81
Perkotaan		62,00	66, 12	69, 92
Perdesaan		73, 64	78, 73	78, 11
(65 Tahun Keatas)		42, 09	43, 85	43, 44
Laki-laki		61, 23	61, 07	62, 29
Perempuan		23, 66	27, 19	25, 24
Perkotaan		33, 86	34, 01	32, 61
Perdesaan		44, 91	47, 32	47, 27

Lampiran 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal dan jumlah Jam kerja, 2015-2016

Kelompok Umur (1)	2015	2016	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 *)	2,37	1,65	1,89
1-7	1,34	2,04	1,29
8-14	6,03	6,52	4,67
15-34	15,25	13,74	12,08
25-34	15,33	14,65	14,53
35-39	10,76	9,11	10,35
40-48	25,03	25,21	23,49
49-59	17,11	17,72	19,18
60+	6,78	9,35	12,51
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
0 *)	2,58	1,52	1,54
1-7	0,84	1,37	0,68
8-14	3,84	4,99	3,06
15-34	12,80	10,99	9,69
25-34	14,78	12,98	13,17
35-39	11,00	8,77	9,30
40-48	29,03	29,58	27,92
49-59	19,24	21,40	22,42
60+	5,90	8,40	12,23
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 *)	1,92	1,90	2,52
1-7	2,38	3,26	2,34
8-14	10,57	9,33	7,48
15-34	20,32	18,77	16,25
25-34	16,47	17,71	16,92
35-39	10,27	9,74	12,20
40-48	16,74	17,21	15,75
49-59	12,71	10,97	13,54
60+	8,62	11,09	13,01
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 *)	1,85	2,24	1,49
1-7	1,10	0,75	0,31
8-14	3,20	3,68	2,07
15-34	7,61	8,56	7,88
25-34	11,30	9,99	12,92
35-39	10,16	8,74	7,90
40-48	35,10	31,61	26,12
49-59	17,43	20,24	22,37
60+	12,25	14,19	18,94
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 *)	2,55	1,43	2,05
1-7	1,43	2,53	1,67
8-14	7,06	7,60	5,69
15-34	18,01	15,70	13,72
25-34	16,79	16,42	15,17
35-39	10,98	9,25	11,32
40-48	21,38	22,79	22,45
49-59	17,00	16,76	17,94
60+	4,80	7,52	9,99

Lampiran 6. Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2015-2016

Lapangan Usaha	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 220 613	779 166	1 155 066	1 282 958	772 229	1 186 786	1 495 668	984 777	1 395 164
2	1 627 582	-	1 627 582	2 240 772	-	2 240 772	1 500 000	-	1 500 000
3	1 894 134	1 414 773	1 801 086	1 944 355	1 352 300	1 836 135	1 909 613	1 150 315	1 727 757
4	2 238 894	-	2 238 894	2 436 815	-	2 436 815	2 258 916	-	2 258 916
5	1 667 197	951 250	1 660 379	1 454 621	2 450 000	1 506 079	1 839 812	2 200 000	1 849 281
6	1 797 596	1 411 287	1 642 566	1 598 754	1 548 088	1 574 897	1 568 844	1 146 255	1 387 297
7	1 883 827	1 560 091	1 847 096	1 889 057	692 074	1 802 991	2 466 233	1 739 209	2 431 567
8	2 074 274	1 970 563	2 035 360	1 993 179	1 681 606	1 899 436	2 150 017	2 332 019	2 213 427
9	2 573 565	2 005 111	2 299 499	3 039 666	2 142 680	2 533 161	2 517 969	1 859 979	2 155 252
Total	1 903 514	1 708 063	1 843 739	1 957 941	1 757 295	1 889 021	1 989 999	1 602 041	1 847 210

Keterangan lapangan usaha :

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri
4. Listrik, Gas dan Air Minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
8. Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Lampiran 7. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2015-2016

Lapangan Usaha	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 451 716	1 090 741	1 155 066	1 042 041	1 204 146	1 186 786	1 357 828	1 404 073	1 395 164
2	2 187 165	1 450 016	1 627 582	1 953 641	2 512 440	2 240 772	1 500 000	-	1 500 000
3	1 745 408	1 831 918	1 801 086	1 765 912	1 877 351	1 836 135	1 675 307	1 755 566	1 727 757
4	3 102 316	1 382 344	2 238 894	2 388 556	2 550 000	2 436 815	2 911 058	1 100 000	2 258 916
5	1 753 365	1 560 169	1 660 379	1 647 506	1 432 475	1 506 079	2 142 689	1 613 080	1 849 281
6	1 841 851	1 165 157	1 642 566	1 615 118	1 479 213	1 574 897	1 489 236	1 242 772	1 387 297
7	2 142 082	1 548 803	1 847 096	1 676 521	1 921 976	1 802 991	2 466 314	2 400 641	2 431 567
8	2 526 689	1 168 304	2 035 360	2 863 300	1 255 866	1 899 436	2 312 605	1 986 217	2 213 427
9	2 622 586	1 942 599	2 299 499	2 761 310	2 328 637	2 533 161	2 320 046	2 002 400	2 155 252
Total	2 158 980	1 561 471	1 843 739	2 101 773	1 738 647	1 889 021	2 002 831	1 727 976	1 847 210

Keterangan lapangan usaha :

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri
4. Listrik, Gas dan Air Minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
8. Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Lampiran 8. TabulasiSilang Batasan Kegiatan Formal/Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Perjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan : F= Formal INF = Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung, 35215

Telp. (0721) 482909 Fax. (0721) 484329

Email : bps1800@bps.go.id, Website : <http://lampung.bps.go.id>

ISSN 2085-8981



9 772085 898100